

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**



Disusun Sebagai Salahsatu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

RIFA MUFLIAH

C100130228

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

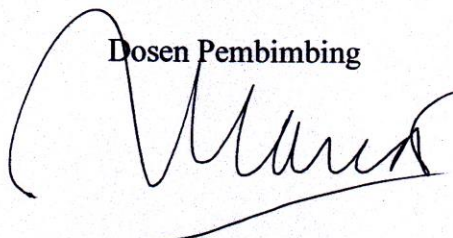
Yang ditulis oleh:

RIFA MUFLIAH

C100130228

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Sudaryono, S.H.M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

RIFA MUFLIAH

C100130228

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 18 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, S.H.,M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H.,M.H

(.....)

Anggota I : Hartanto, S.H.,M.Hum

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dra. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 April 2017

Penulis



RIFA MUFLIAH

C100130228

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif, yang menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK dan Polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) KPK dan Polri memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, namun KPK tidak diperbolehkan untuk memonopoli penyelidikan dan penyidikan. (2) Pengaturan koordinasi dan supervisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa dalam melakukan koordinasi KPK menjadi koordinator untuk lembaga lain, dan dalam supervisi KPK berhak melakukan tindakan pengawasan dan dengan alasan tertentu KPK berhak mengambil alih penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya atau telah dilakukan oleh Polri.

Kata Kunci : *Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determinate the authority by law enforcement officials in the institutions of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian National Police (Polri) in terms of the research and the investigation of corruption. This study uses normative legal approach. Data collection techniques in this research is the study of literature and analyzed by qualitative data analysis, which analyzes legislation relating to powers of inquiry and investigation by the Commission and the National Police. These results indicate that (1) the Commission and the Police have the authority to conduct inquiries and investigations of corruption, but the Commission is not allowed to monopolize penyelidikan and investigation. (2) setting the coordination and supervision contained in Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission which states that the coordination of the Commission as coordinator for other institutions, and in the supervision of the Commission the right to conduct surveillance measures and the specific reasons the Commission is entitled to take over the investigation and a previous investigation or have been conducted by the police.

Keywords: *Research, Investigations, Corruption*

1. PENDAHULUAN

Hasil riset Lembaga *Transparency International* (TI) yang berkedudukan di Berlin, selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia. Selama pemerintahan reformasi yang menjadikan korupsi sebagai salah satu agenda yang harus diberantas, tetapi dalam realitasnya korupsi terus terjadi dan sudah melanda sampai ke daerah.¹

Walaupun sudah ada KPK hal itu tidak berarti penyidik Polri tidak lagi berhak mengusut kasus korupsi; pengusutan kasus tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.²

M. Yahya Harahap menyatakan, sistem peradilan pidana yang digaris KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip *differensiasi fungsional* diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.³

Menurut Ruslan Renggong dalam bukunya koordinasi merupakan mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Walaupun aparat penegak hukum memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum yang lain, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, aparat penegak hukum harus dapat mewujudkan hubungan fungsional.⁴

¹ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 59

² Moh. Hatta, 2014, *KPK Dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 38.

³ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press. Hal. 45

⁴ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana 'Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia'*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 169

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah kewenangan KPK dan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang yang berlaku dan bagaimanakah pengaturan koordinasi dan supervisi KPK terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dengan Polri.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPK dan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang yang berlaku, dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan koordinasi dan supervisi KPK terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dengan Polri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dari perundang-undangan, bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen dan dari jurnal hukum. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, menginventarisasi, mempelajari dan menganalisa data-data yang terdapat dalam buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK dan Polri dalam tindak pidana korupsi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan KPK dan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang yang berlaku

3.1.1 Kewenangan KPK dalam melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6 huruf C UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, bahwa KPK mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, (e) Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 11 dikatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: (a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau, (c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dalam Pasal 12 “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: (a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; (b) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; (c) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; (a) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; (b) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara

tersangka dari jabatannya; (c) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; (d) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; (a) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; (b) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani

3.1.2 Kewenangan Polri dalam melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa “Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”

Selain itu dipertegas kembali dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, bahwa Polri bertugas untuk “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

3.1.3 Kewenangan KPK dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal penyidikan ada wewenang lebih yang dimiliki oleh KPK yaitu melakukan koordinasi dan supervisi yang dapat melakukan pengambil alihan terhadap penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan (Pasal 8).

Namun jika pada suatu tindak pidana korupsi KPK belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja (Pasal 50 ayat (1)) dan wajib melakukan koordinasi secara terus menerus (ayat (2)). Disaat KPK sudah mulai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut maka baik Polri maupun Kejaksaan harus menghentikan penyidikan dan tidak lagi memiliki kewenangan (ayat (3)). Apabila penyidikan dilakukan secara bersamaan maka Polri dan Kejaksaan wajib menghentikan penyidikannya. (ayat (3)).

Bahkan penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 UU KPK) hal ini berbeda dari penyidik Polri yang harus mendapat izin dari ketua pengadilan. (Pasal 38 KUHP). Namun KPK tidak dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (Ps 40 UU KPK), sedangkan Polri dapat mengeluarkan SP3.

3.1.4 Kewenangan Polri dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa proses dilakukan sebagaimana hukum acara yang berlaku. Maka Polri juga turut serta melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi, mengingat dalam KUHP Polri juga dikategorikan sebagai penyidik seluruh tindak pidana. Terlebih dalam Pasal 14 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri bertugas “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

Seperti yang telah ditulis Moh. Hatta (2014: 102-106) bahwa Di dalam KUHP, polisi adalah penyidik, tetapi tidak ada suatu pasal pun yang menyebut Polri atau polisi adalah penyidik tunggal. Namun, Polri mempunyai keinginan implisit yang kuat untuk turut melakukan

penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi yang kemudian melahirkan Divisi Tipikor.

Polri memang masih dianggap lemah dalam melakukan pemberantasan korupsi, selain regulasi yang dimiliki Polri tidak menunjang layaknya regulasi yang dimiliki KPK. Selain itu Polri yang berada dibawah koordinasi eksekutif (Pasal 8 UU Polri) seringkali Polri dirundung campur tangan politik dan pemerintahan, yang menimbulkan tindakan terhadap perkara korupsi menjadi tidak maksimal.

3.2 Koordinasi dan supervisi KPK terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dengan Polri

Sebagai sebuah lembaga pemberantas korupsi, KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat *powerful*, karena memiliki kewenangan istimewa dalam memberantas korupsi. Kewenangan ini tidak dimiliki (atau hanya sebagian saja dimiliki) oleh lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Misalnya, KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan ini sangat *powerful*, karena melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dan Polri. Selain itu, KPK sering disebut sebagai lembaga *superbody*, karena merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk memimpin lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan perkara-perkara korupsi.⁵

Selain itu koordinasi dan supervisi yang melengkapi KPK dapat mendukung KPK sebagai mekanisme pemicu dan pemberdaya (*Trigger mechanism*) terhadap institusi yang telah ada sebelumnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan UU KPK: 1) Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 2) Tidak memonopoli tugas dan wewenang

⁵ Zainal Abidin dan A Gimmy Prathama siswadi, *Psikologi Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 51

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 3) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4) Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan

3.2.1 Koordinasi KPK terhadap Polri dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam melaksanakan koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bahwa KPK mempunyai beberapa kewenangan seperti dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002: (a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; (b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; (d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Dari pasal diatas maka KPK berada diposisi sebagai koordinator, oleh karena itu Polri memiliki kewajiban untuk koordinasi dan melaporkan perkara kepada KPK. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa PPNS berada dibawah koordinsi dan pengawasan Polri. Bahwa KPK seharusnya dapat dikategorikan sebagai PPNS.

Kemudian dalam UU KPK membuat pengecualian tersendiri, untuk menegaskan kembali bahwa KPK tidak berada dibawah koordinasi Polri, dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak berlaku.

3.2.2 Supervisi KPK terhadap Polri dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Kerja sama dan saling mengawasi melibatkan penyidik, penuntut umum, hakim, tersangka atau terdakwa, atau penasehat hukumnya dan aparat rutan atau aparat lembaga pemasyarakatan.⁶ Pasal 8 ayat (1) UU KPK:

“Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik”

Selain itu dalam rangka supervisi, KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan, dalam ayat (2):

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”

Maka saat terjadi pengambil alihan perkara oleh KPK, maka Polri wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas dan serta bukti yang telah ditemukan sebelumnya kepada KPK, ayat (3):

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi”

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa:

⁶ Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hal. 170

“Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf”

Pelimpahan penyelidikan dan penyidikan serta penyerahan tersangka, berkas dan alat bukti dilimpahkan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (ayat 4)

Namun tidak serta merta KPK dapat melakukan pengambil alihan, harus terdapat alasan-alasan yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 9: a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

“Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.”

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat menarik kesimpulan: *pertama*, bahwa kedua lembaga baik KPK dan Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. KPK memang tidak didesain untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi. Melainkan untuk menjadi pemantik dan memberdayakan instansi yang telah ada sebelumnya.

Kedua, KPK menjadi koordinator untuk instansi penegak hukum yang lain termasuk Polri. Sedangkan dalam hal supervisi KPK berhak melakukan tindakan pemantauan, pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal dan alasan-alasan tertentu KPK berhak untuk mengambil alih penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya atau telah dilakukan oleh Polri.

4.2 Saran

Adanya perselisihan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum terhadap bahaya laten korupsi sangat disayangkan, karena mengingat korupsi semakin besar geliatnya oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu beberapa upaya agar tidak terjadi perselisihan tumpang tindih kewenangan dan berebut kasus korupsi. Beberapa saran yang mungkin dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

Pertama, pemahaman kembali terhadap undang-undang yang terkait dengan penegakan penyelidikan dan penyidikan korupsi.

Kedua, memperkuat jalinan koordinasi antara KPK dan Polri sebagaimana diatur dalam undang-undang. Masalah perebutan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan perkara korupsi antara KPK dan Polri dapat diminimalisir dengan adanya koordinasi baik antara kedua lembaga tersebut. Sehingga baik tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan pelaku korupsi dapat diadili dengan tepat. KPK selaku koordinator terhadap lembaga lain harus mampu mengarahkan dan menjadi pemantik untuk lembaga lain. Sementara lembaga dibawah KPK harus transparan terhadap apa yang terjadi dan melakukan koordinasi. Bila perlu diadakan pertemuan rutin untuk melakukan koordinasi maupun supervisi. Saling menghormati antar lembaga.

Ketiga, tidak ada tendensi kepentingan politik, golongan atau individu dalam penegakan hukum semua berdasarkan untuk kepentingan negara dan rakyat.

Keempat, transparansi dalam setiap penegakan disegala kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal dan A Gimmy Prathama siswadi, 2015, *Psikologi Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Handoko, Hani, 2003, *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE.
- Hatta, Moh. 2014, *KPK Dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Prees.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana 'Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia'*, Jakarta: Prenadamedia Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia